

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN BENA
DAN BELI PRODUK DAERAH DI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Syifa Aulia, Saipul

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Syifa Aulia

NIM : 2102016079

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 17 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. H. Saipul, M. Si.

NIP 19760907 200312 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 13
---------------	-------------

Nomor	: 4
--------------	------------

Tahun	: 2025
--------------	---------------

Halaman	: 1287-1300
----------------	--------------------

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN BENA DAN BELI PRODUK DAERAH DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Syifa Aulia ¹, Saipul ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu menggunakan teori Van Meter dan Van Horn serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yang diterapkan yaitu model interaktif. Implementasi kebijakan gerakan bena dan beli produk di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal. Pada standar terdapat peraturan daerah melalui Disperindag Kukar sebagai leading sector, sasaran UMKM belum mencakup keseluruhan kecamatan. Pada sumber daya belum optimal dikarenakan belum adanya tim khusus dan terjadi perubahan anggaran serta keterlambatan proses pencairan dana namun sumber daya waktu yang telah memadai dengan disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan dinas. Pada karakter organisasi pelaksana berjalan optimal melalui budaya kerja dan proses kerja yang efektif. Pada aspek sikap para pelaksana berjalan baik melalui komitmen terhadap peraturan bupati. Pada aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berjalan baik dengan membangun kepedulian terhadap produk lokal, memperkuat kemandirian ekonomi daerah, dan arahan langsung dari pimpinan daerah melalui peraturan bupati. Adapun faktor penghambat dalam implementasi tersebut yaitu kurangnya produk lokal unggulan yang dijangkau oleh dinas, minimnya alokasi anggaran terhadap implementasi kebijakan, kurangnya sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat, serta belum adanya forum komunikasi antar pihak terlibat.

Kata Kunci : *Gerakan Bena, Produk Lokal, Ekonomi Daerah*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas jangka panjang pada suatu negara yang terjalin dalam menyediakan beraneka ragam kebutuhan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: syifaaulia23456@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

barang ekonomi terhadap penduduknya. Peningkatan ini dapat dicapai dengan membangun ekonomi kerakyatan salah satunya dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia. UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, peningkatan sosial, dan stabilitas politik (Ndiaye dkk., 2018). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan menghasilkan hingga 60,4% dari total investasi (Junaidi, 2025). Pemerintah dituntut untuk peka terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Prasetyo, 2018; Mammadli & Klivak, 2020).

Pemerintah telah menyadari untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai program termasuk kebijakan publik yang dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM melalui dukungan riset dan pengembangan serta promosi produk lokal. Selaras dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk buatan sendiri, inisiatif ini diproyeksikan dapat mendongkrak performa UMKM, memajukan ekonomi bangsa, sekaligus menekan angka ketergantungan impor (Marginingsih, 2021).

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang mengembangkan UMKM melalui potensi budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan tugas untuk menyelenggarakan pemberdayaan kewirausahaan UMKM Kukar melalui kebijakan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah. Kata “bena” bermakna “menarik perhatian” sehingga dimaksudkan sebagai gerakan untuk peduli terhadap produk daerah diselaraskan dengan menggunakan istilah “Beli hak leh Produk Kutai Kartanegara” untuk membedakan produk daerah dengan menggunakan istilah berbasis muatan lokal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Kartanegara memegang peran sebagai *leading sector* dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah dengan menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan untuk memastikan keberhasilan gerakan tersebut. Disperindag Kabupaten Kutai Kartanegara aktif mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal melalui fasilitasi akses pasar melalui pameran, *marketplace*, dan kolaborasi dengan pelaku usaha besar.

Dalam perjalanannya, Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya meliputi: 1) Disperindag Kabupaten Kutai Kartanegara belum mampu menjangkau atau mencakup seluruh produk unggulan UMKM Kutai Kartanegara, 2) kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan dan membeli produk lokal UMKM Kukar, 3) terbatasnya alokasi

anggaran dalam menjalankan kebijakan, 4) lemahnya sinergi dan partisipasi dengan lingkungan OPD dalam menjalankan kebijakan. Beberapa identifikasi masalah mengenai gerakan bena dan beli produk daerah Kukar mengindikasikan bahwa terdapat masalah mengenai standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakter organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, dan lingkungan kebijakan sebagaimana enam variabel di dalam model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Maka sebagaimana uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Kebijakan Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara”**.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky dalam Winarno (2007) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung unsur kondisi dasar dan dampak yang dapat diantisipasi. Kebijakan publik merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik baik di Indonesia maupun negara lain, sehingga upaya ini diwujudkan melalui serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh berbagai aparatur atau lembaga negara (Taufiqurokhman, 2014). Sebagai keputusan yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat luas, perumusan kebijakan publik harus dilakukan oleh otoritas politik yang memiliki legitimasi. Legitimasi ini bersumber dari mandat rakyat yang diperoleh melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum (Mandolang, dkk., 2019). Dalam hal ini, tujuan kebijakan publik menjadi serangkaian langkah strategis pemerintah yang diorientasikan untuk memenuhi harapan publik dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil diatas bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian proses aktivitas yang diumumkan oleh pemerintah, baik yang akan dilaksanakan maupun yang tidak, dalam rangka mengatur jalannya pemerintahan suatu negara untuk mencapai aspirasi dan tujuan nasional.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2005), implementasi kebijakan sebagai serangkaian aktivitas nyata yang dieksekusi oleh berbagai aktor, mulai dari individu, pejabat birokrasi, hingga entitas pemerintah maupun sektor swasta. Seluruh tindakan tersebut berorientasi pada satu fokus utama, yakni merealisasikan target-target yang sebelumnya telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Kadji (2015) implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas operasional yang dijalankan untuk merealisasikan target kinerja. Proses ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari interaksi dinamis antar berbagai faktor

penentu yang secara kolektif memengaruhi hasil akhir atau capaian kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk mengoperasikan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan bagi kelompok yang menjadi sasaran.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Kwartono dalam Dewi & Anwar (2024), UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp.200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan dan atau mereka yang mempunyai omset penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia. Menurut Sofyan (2017) UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi; penyedia lapangan kerja; pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru; dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM sebagai usaha produktif yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau badan usaha dengan skala kecil hingga.

Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah

Merujuk pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah bahwa gerakan bena dan beli menengah produk adalah gerakan untuk mendorong masyarakat guna mencintai dan bangga terhadap produk Kutai Kartanegara diwujudkan dengan inisiatif peduli produk daerah dengan mendukung, membeli, dan menggunakan produk Kutai Kartanegara. Hal ini juga menjadi salah satu upaya dalam menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sehingga hadirnya gerakan ini untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan UMKM melalui fasilitasi peningkatan sarana pemasaran dan kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal (Amanda, 2022).

Gerakan ini mengarah pada pengembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai produsen produk lokal unggulan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah (Berlin, 2024). Dengan demikian, gerakan ini tidak hanya fokus pada penjualan produk, tetapi juga pada pembinaan dan pengembangan kapasitas UMKM, sehingga mereka dapat bersaing dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional menjadi acuan peneliti yang berguna sebagai batasan penelitian yang mendefinisikan secara konseptual agar berfokus pada fenomena masalah yang menjadi dasar peneliti. Implementasi kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah adalah suatu pelaksanaan kebijakan mengenai upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui pengaturan penggunaan produk lokal

unggulan daerah dalam mendukung dalam upaya mengembangkan potensi usaha mikro usaha kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu menganalisis implementasi kebijakan gerakan bena dan beli produk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui model Van Meter dan Van Horn, meliputi: 1) standar dan sasaran kebijakan; 2) sumber daya; 3) karakteristik organisasi pelaksana; 4) komunikasi antar organisasi; 5) sikap para pelaksana; dan 6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dan mendeskripsikan penyebab kendala atau hambatan dalam implementasi kebijakan. Adapun sumber data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara dari informan yakni adalah Plt (Pelaksana Tugas) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Barang Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pelaku Usaha Produk Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya sumber data sekunder berupa dokumen, foto, arsip, dan laporan resmi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Septiana dkk. (2023) mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu upaya dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai respon pemerintah terhadap potensi dan tantangan UMKM dengan Gerakan menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Kemudian kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah. Guna menjamin tercapainya sasaran pengembangan UMKM, standar kebijakan dengan berfokus pada kegiatan peningkatan penggunaan produk lokal di instansi pemerintahan, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan

dan bimbingan teknis, serta promosi produk lokal melalui pameran dan media digital. Hal ini sesuai dengan penelitian Putri dkk. (2022) yaitu kehadiran standar yang jelas dalam pelaksanaan akan mengurangi berisiko kebijakan ambigu yang rentan terhadap distorsi interpretasi, inefisiensi alokasi sumber daya, dan ketidakpastian dalam evaluasi kinerja.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan *leading sector* yang memiliki mandat secara institusional dalam mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen melalui upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran bagi produk unggulan Kukar. Sebagaimana penelitian Mayasari (2023) menyatakan bahwa penting untuk ditetapkan pelaksana kebijakan sebagai mandat dan penggerak utama dalam implementasi kebijakan penguatan ekonomi daerah. Kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah diberlakukan dengan menargetkan UMKM yang menjadi produk lokal unggulan Kukar. Hal ini direalisasikan melalui target dengan cara mendukung keberadaan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran, dan penggunaan produk. Hingga kini jumlah produk unggulan Kukar hanya sebanyak 137 produk yang tersebar di 10 kecamatan dari total keseluruhan 20 kecamatan yang dengan rincian produk makanan tradisional dan aneka kerajinan menjadi produk paling dominan yang didata oleh dinas ini. Hal ini dikarenakan terdapat kendala dalam kepemilikan legalitas usaha sebagai syarat yang harus dipenuhi UMKM. Sebagaimana penelitian Siregar (2023) bahwa ketidakmerataan sasaran kebijakan berdampak sistemik pada terfragmentasinya implementasi kebijakan dan berujung pada gagalnya kebijakan mencapai target inklusivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

2. Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn dalam Septiana dkk. (2023) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pada SDM, implementasi kebijakan tidak memiliki pelaksana khusus untuk pelaksanaan kebijakan dan menjadi tanggung jawab keseluruhan pegawai dalam upaya gerakan bena dan beli produk daerah. Dalam hal ini, saat penyelenggaraan kegiatan yang bertugas adalah Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri & Pengendalian Barang Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara. Hal ini akan menyebabkan bias dalam implementasi kebijakan dikarenakan tidak adanya pelaksana teknis yang bertugas secara khusus dalam pelaksanaan kebijakan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursyidah (2024) menyatakan bahwa ketiadaan tim khusus yang dibentuk untuk mengimplementasikan kebijakan maka akan terjadi disintegrasi koordinasi dan tumpang tindih tanggung jawab antar pihak yang terlibat. Selanjutnya, pemahaman kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah dilakukan oleh masing-masing pegawai melalui sharing antar pegawai. Dalam menjalankan kebijakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan koordinasi dengan pihak lain yaitu seluruh ASN di lingkungan Kukar, UMKM Kukar serta pihak swasta.

Dalam pelaksanaan kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah, anggaran bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada tahun 2024 berfokus pada kegiatan peningkatan penggunaan produk lokal di instansi pemerintahan, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta promosi produk lokal melalui pameran dan media digital. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara mengalami kendala dalam penganggaran kegiatan dikarenakan terjadi perubahan anggaran dan keterlambatan dalam proses pencairan dana yang menghambat operasional kegiatan menyebabkan terbatasnya ruang promosi produk lokal. Tanpa dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan promosi, edukasi, dan fasilitasi pemasaran yang berkelanjutan, gerakan ini kesulitan untuk mendapatkan daya ungkit yang maksimal dalam mendorong produk UMKM unggulan daerah. Sebagaimana penelitian Putri dkk. (2024) menyatakan bahwa ketidaktepatan alokasi anggaran dapat menyebabkan terhambatnya tujuan kebijakan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, sumber daya waktu merupakan salah satu faktor krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, pemetaan waktu pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada beberapa kegiatan telah direncanakan sesuai dengan alokasi waktu dan prioritas kegiatan sehingga dapat berjalan secara optimal. Implementasi kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan dinas guna meningkatkan kualitas layanan perdagangan serta mendukung keberadaan pelaku dalam melakukan kegiatan produksi dan penggunaan produk lokal.

3. Karakter Organisasi Pelaksana

Van Meter & Van Horn dalam Siregar (2023) menjelaskan bahwa karakteristik agen pelaksana merujuk kepada seberapa besar daya dukung struktur organisasi pelaksanaan, mulai dari pembagian tugas hingga wewenang dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara sebagai instansi responsif dalam menindaklanjuti dan merespon kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah. Sebagaimana penelitian oleh Dewi dkk. (2024) bahwa penempatan kebijakan pada dinas yang sesuai dengan tugasnya menjadi prasyarat mutlak bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Rencana Strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan peluang yang timbul. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja secara disiplin melalui proses kerja yang efisien dan budaya kerja positif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, bersemangat, dan kerjasama yang efektif antar pegawai. Diperlukan dinas yang terus bersinergi bersama agar komitmen menjadi satu arah dan punya makna yang jelas. Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri & Pengendalian Barang Pokok menjadi pelaksana teknis saat diadakan

penyelenggaraan kegiatan yang berkenaan dengan gerakan bena dan beli produk daerah dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah diatur dan dibagi selaras dengan kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai. Hal ini dikarenakan masih selaras dengan tugas dan fungsi bidang yaitu pengurusan terhadap penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, pemantauan dan pengendalian barang pokok dan barang penting, serta pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Septiana dkk. (2023) menyatakan komunikasi dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.. Pada peningkatan penggunaan produk lokal di instansi pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk dapat berpartisipasi aktif dengan memakai produk daerah misalnya konsumsi dari UMKM lokal atau penggunaan batik motif khas daerah atau saat memfasilitasi kunjungan tamu, melakukan kunjungan kerja atau kunjungan wisata Kukar sebagai bentuk pemasaran produk daerah. Komunikasi juga terjalin kepada pihak swasta guna menciptakan ekosistem dalam mendukung penyebarluasan informasi dan akses pasar yang lebih luas. Selanjutnya komunikasi kepada UMKM terjalin melalui pendataan produk unggulan dengan diiringi pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta promosi produk lokal melalui pameran dan media digital.

Yolanda (2024) mengatakan bahwa semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Komunikasi dan koordinasi dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dengan cara menyesuaikan tergantung sesuai kebutuhan yang diperlukan namun tidak ada forum komunikasi yang dikhususkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi para pihak yang terlibat. Koordinasi yang dihadirkan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan dan tidak berjalan secara intens melainkan hanya momentum saat menjelang pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan kepada ketiga unsur yang terlibat. Ketidakhadiran desa atau kecamatan percontohan, kebijakan berisiko diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik spesifik setiap wilayah serta akan sulit bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan bukti nyata keberhasilan kebijakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat mengurangi dukungan dan partisipasi aktif dalam program (Kadji, 2015).

5. Sikap Para Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016) menyatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merespon arahan Bupati Kutai Kartanegara

dengan antusias. Sebagai pelaksana kebijakan merespon dan menindaklanjuti arahan Bupati Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam bentuk Perbup sebagai fondasi guna menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dan keselarasan dengan antara pemimpin daerah dan dinas terkait sebagai faktor kunci dalam menciptakan momentum awal implementasi kebijakan dengan menuntaskan target yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan dengan bermuara pada upaya mendukung fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan dengan penggunaan produk lokal unggulan daerah. Komitmen kuat ini tercermin melalui konsistensi dalam menjalankan kebijakan selaras dengan standar dan sasaran yang telah ditetapkan (Suaib, 2016). Dalam menjaga keberlanjutan kebijakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara membuat laporan realisasi kegiatan pada akhir tahun anggaran sebagai bentuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2023) bahwa penyusunan laporan realisasi kegiatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen akuntabilitas publik yang kritis dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekaligus menjamin keberlanjutan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan riil kelompok sasaran.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Van Meter & Van Horn dalam Suaib (2016) menyatakan bahwa keikutsertaan lingkungan eksternal dalam faktor juga mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan. Pada aspek sosial, UMKM Kukar sebagai sasaran mendukung kehadiran kebijakan dikarenakan merasa diuntungkan dengan kebijakan gerakan bena sebagai bentuk mencintai dan bangga terhadap produk Kukar dengan mendukung dan menggunakannya. Kemudian masyarakat juga turut mendukung implementasi kebijakan dengan ikut serta melalui tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap produk lokal. Namun masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan dan membeli produk lokal UMKM Kukar.

Pada aspek ekonomi, implementasi kebijakan menjadi stimulus ekonomi lokal secara strategis dengan mendorong sirkulasi ekonomi daerah dengan potensi besar untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta mengurangi ketergantungan terhadap produk luar atau impor. Hal ini juga turut dirasakan oleh UMKM Kukar dikarenakan bermanfaat dalam meningkatkan volume penjualan UMKM dengan berbagai upaya yang telah dilakukan meliputi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan bagi UMKM terkait legalitas usaha dan branding usaha serta membangun akses pasar dengan jangkauan yang luas seperti permintaan tetap dari instansi pemerintahan lingkungan Kukar dan membuka pasar lebih luas. Hal ini sesuai Yolanda (2024) menyatakan bahwa kebijakan yang mendukung keberadaan kebijakan yang mendukung ekonomi ekonomi dapat

memicu multiplier effect dengan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi produk, dan memperkuat jejaring usaha lokal.

Pada aspek politik, telah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah sebagai instrumen legitimasi politik yang menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan politik yang diberikan juga mencakup bagaimana adanya arahan dari Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menginstruksikan seluruh pegawai mendukung kehadiran produk lokal. Sebagaimana penelitian oleh Siregar (2023) menyatakan bahwa untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, diperlukan upaya institusionalisasi yang memadai sehingga dukungan politik tidak hanya menjadi penggerak awal, tetapi juga penjamin keberlangsungan kebijakan dalam jangka panjang.

Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara belum dapat menjangkau keseluruhan UMKM yang menjadi target produk unggulan Kukar.

Terungkap bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara masih menghadapi kendala signifikan dalam menjangkau keseluruhan UMKM sebagai produk unggulan pada implementasi kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah, meskipun secara eksplisit UMKM telah ditetapkan sebagai sasaran utama kebijakan. Di sisi lain, UMKM Kukar harus memenuhi persyaratan teknis seperti legalitas usaha yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk terdaftar sebagai produk unggulan Kukar. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi yang dipengaruhi dikarenakan tidak proporsional dengan cakupan wilayah dan jumlah UMKM yang tersebar di 20 kecamatan, serta belum optimalnya sistem pendataan dan verifikasi produk unggulan yang terintegrasi. Selain itu, kurangnya sinergi dengan pemerintah kecamatan/desa dalam pendampingan teknis menyebabkan pendataan cenderung terpusat pada wilayah yang mudah diakses

2. Terbatasnya alokasi anggaran dalam implementasi kebijakan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kendala mengenai penganggaran implementasi kebijakan. Alokasi anggaran mengenai kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah tidak menjadi prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Diketahui bahwa terdapat 2 program yang tidak dianggarkan kembali pada tahun 2024 salah satunya adalah Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan fiskal yang ditandai dengan perubahan anggaran di tengah tahun anggaran dan keterlambatan proses pencairan dana, yang tidak hanya mengganggu perencanaan kegiatan jangka menengah tetapi juga mengacaukan operasional kegiatan seperti partisipasi dalam pameran

dan terbatasnya ruang promosi produk unggulan dari skala, frekuensi, dan kualitas acara. Sebagaimana penuturan Van Meter & Van Horn dalam Tjilen (2019) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, anggaran yang terbatas yang diberikan kepada pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek penyebab kegagalan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Minimnya sosialisasi dan edukasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai gerakan bena dan beli produk daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masih minim kesadaran masyarakat Kutai Kartanegara untuk turut mendukung gerakan guna mencintai dan bangga terhadap produk Kutai Kartanegara melalui tindakan peduli dengan mendukung, membeli, dan menggunakan produk Kutai Kartanegara. Terdapat asumsi dan persepsi bahwa produk luar daerah atau impor lebih berkualitas dan modern dibandingkan produk lokal sehingga masyarakat cenderung mengabaikan produk UMKM Kukar. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi secara masif dan berkelanjutan tentang manfaat ekonomi dan sosial dari membeli produk daerah seperti mendorong lapangan kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang impor menyebabkan minimnya pemahaman publik tentang dampak positif gerakan gerakan bena dan beli produk daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi dkk. (2024) menyatakan bahwa rendahnya intensitas sosialisasi menyebabkan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme partisipasi kebijakan sehingga antusiasme dan dukungan masyarakat tidak terbangun secara optimal.

4. Tidak adanya forum komunikasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada forum komunikasi yang dikhususkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Koordinasi yang dihadirkan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan dan tidak berjalan secara intens melainkan hanya momentum saat menjelang pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan kepada ketiga unsur yang terlibat. Hal ini mencerminkan kelemahan struktural yang berakibat pada terfragmentasinya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang mana koordinasi hanya aktif pada momentum jelang pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat tidak berjalan intensif, berkelanjutan, dan sistematis. Sejauh berjalannya kebijakan, tidak terdapat komunikasi yang dihadirkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kukar kepada desa dan kelurahan di daerah Kukar. Hal ini dikarenakan tidak ada tim khusus dalam implementasi kebijakan sehingga tidak menjadi prioritas dinas dalam melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak terlibat.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah

di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal dijalankan. Hal ini dapat ditinjau dari Pada standar terdapat peraturan daerah melalui Disperindag Kukar sebagai *leading sector*, sasaran UMKM belum mencakup keseluruhan kecamatan. Pada sumber daya belum optimal dikarenakan belum adanya tim khusus dan terjadi perubahan anggaran serta keterlambatan proses pencairan dana namun sumber daya waktu yang telah memadai dengan disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan dinas. Pada karakter organisasi pelaksana berjalan optimal melalui budaya kerja dan proses kerja yang efektif. Pada aspek sikap para pelaksana berjalan baik melalui komitmen terhadap peraturan bupati. Pada aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berjalan baik dengan membangun kepedulian terhadap produk lokal, memperkuat kemandirian ekonomi daerah, dan arahan langsung dari pimpinan daerah melalui peraturan bupati. Adapun faktor penghambat dalam implementasi tersebut yaitu kurangnya produk lokal unggulan yang dijangkau oleh dinas, minimnya alokasi anggaran terhadap implementasi kebijakan, kurangnya sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat, serta belum adanya forum komunikasi antar pihak terlibat.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian mengajukan saran-saran:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara memperkuat sinergitas atau berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan jangkauan UMKM terkhususnya melalui pendampingan teknis dan verifikasi produk unggulan UMKM.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara mengoptimalkan alokasi anggaran dan ketidakstabilan fiskal terhadap kinerja operasional dan pencapaian target kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah dengan menganalisis urgensi dan penentuan prioritas alokasi anggaran tahunan untuk kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah serta merumuskan strategi mitigasi risiko fiskal melalui perubahan anggaran di tengah tahun atau keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada kegiatan promosi, pameran, dan ruang promosi UMKM.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara meningkatkan sosialisasi dan edukasi guna dalam meningkatkan kesadaran, antusiasme, dan dukungan masyarakat terhadap gerakan bena dan beli produk daerah dengan melibatkan media digital maupun konvensional agar mampu menyalurkan informasi secara masif terkait manfaat ekonomi dan sosial pembelian produk daerah khususnya pada daerah terpencil.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara segera merealisasikan pembentukan tim khusus internal yang bertugas secara khusus mengawal implementasi kebijakan. Tim ini harus secara intensif berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kukar guna mendata keseluruhan UMKM sebagai produk unggulan Kukar dan membuat forum komunikasi yang intensif antar pihak yang terlibat dalam menjamin

koordinasi yang sistematis dan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan gerakan bena dan beli produk daerah.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Amanda, N. A. M. (2022). *OPD KUKAR diminta belanja barang dan jasa di Mbizmarket*. Alenia.Id. <https://www.alinea.id/daerah/opd-kukar-diminta-belanja-barang-dan-jasa-di-mbizmarket-b2f149eot>
- Berlin. (2024). *Disperindag KUKAR Galakkan Lagi Program “Bena Dan Beli Produk Lokal Kukar.”* 1BANGSA.ID. <https://1bangsa.id/2024/04/19/disperindag-kukar-galakkan-lagi-program-bena-dan-beli-produk-lokal-Kukar/>
- Dewi, A. P., & Anwar, M. K. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Komunitas Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha (ASIPA) Tanggerang Selatan. *Jurnal Transformasi Bisnis Digital*, 1(5), 80–100. <https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JUTRABIDI/article/view/326/574>
- Junaidi, M. (2025). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*. DJPB Kemenkeu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Relitas*. Penerbit UNG Press Gorontalo.
- Mammadli, E., & Klivak, V. (2020). *Measuring the Effect of The Digitalization*. University of Tartu, 1–14. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3524823
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 110–116. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>
- Mayasari, D. (2023). Smart Economy untuk Mencapai Ketahanan Ekonomi dan City Branding pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kendal. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 731. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.641>
- Mursyidah, L. (2024). Meningkatkan Akses Informasi Publik: Evaluasi Efektivitas Petugas Informasi di Indonesia. *Frontiers in Research Journal*, 1, 118–135. <https://digital-science.pubmedia.id/index.php/frontiers/article/view/267/339>
- Ndiaye, N., dkk. (2018). Demystifying Small and Medium Enterprises’ (SMEs) Performance in Emerging and Developing Economies. *Borsa Istanbul*, 18(4), 269–281.

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845018300280>
- Prasetyo, D. W. (2018). Pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Konveksi Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung - Jombang. *Comvice : Journal of Community Service*, 2(1), 9–14. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.122>
- Putri, C. A., Noviantini, E. F., Ramadhani, F. N., & Fadilla, A. (2024). Peran APBN dalam Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.202>
- Putri, R. M., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2022). Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(1), 019–042. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i1.4369>
- Septiana, A. R., dkk. (2023). *Kebijakan Publik : Teori , Formulasi Dan Aplikasi* (Issue May).
- Siregar, T. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal IPDN*, 1–11. <http://eprints.ipdn.ac.id/14461/>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33–64. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/298>
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Universitas Moestopo Beragama Press
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Nusa Media.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media PressIndo.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://journal.utnd.ac.id/index.php/jmdb/article/view/1147>